

Kontribusi Perempuan Dalam Bernegara (Studi Budaya & Komunikasi Politik Di Kalimantan Selatan)

Women's Contribution to the State (Cultural Studies & Political Communication in South Kalimantan)

**FAVI ADITYA IKHSAN,
M.MED.KOM^{1*}**

**MUHAMMAD HUSNI,
M.HUM^{2*}**

**MUHAMMAD NOOR,
S.HUM^{3*}**

^{*1,2,3} IAIN Palangka Raya, Palangka
Raya, Kalteng, Indonesia

*email: faviaditya.ikhsan@iain-palangkaraya.ac.id

Kata Kunci:
Komunikasi Politik
Budaya
Politisi Perempuan

Keywords:
Political Communication
Culture
Female Politicians

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterlibatan perempuan di dunia politik pada lingkup legislatif & eksekutif, peneliti membedakan dari 2 aspek yaitu sisi komunikasi politik & budaya. Fenomena panggung politik saat ini, tidak hanya laki-laki saja kini perempuan ikut aktif di dunia politik dalam memberikan kontribusinya dalam bernegara. Lagipula, perempuan di era sekarang yang aktif masuk ke dunia politik sudah sangat terbuka dari mencalonkan diri sebagai kandidat hingga pada peluang keterpilihannya menjadi sangat mungkin, walau masih minim existing perempuan politik yang memegang kendali strategis di dunia politik tetapi kesempatan itu sudah ada. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan sejauh mana kontribusi perempuan politik di dunia parlemen ataupun eksekutif dari tinjauan komunikasi politik & budaya yang berkembang dimasyarakat Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan data kepustakaan diambil dari penelitian data artikel melalui jurnal penelitian yang sama berupa tulisan lain yaitu buku referensi, monografi, buku, pemberitaan media dan buku teks sebagai sumber-sumber. Penelitian menemukan bahwa kontribusi perempuan politik dalam bernegara di Kalimantan Selatan ditinjau dari komunikasi politik & budaya ialah melahirkan berupa kerja-kerja politik dan keterlibatan pendekatan budaya masyarakat hingga mampu mendekati konstituen saat kampanye-terpilih hingga melahirkan kebijakan. Dalam menyuarakan aspirasi di ruang parlemen bagi 4 legislator perempuan dalam penelitian ini termasuk mampu mengimplementasikan program saat kampanye. Seiring itu juga misi dari Bupati Barito Kuala sebagai eksekutor kepala daerah pertama di Kalsel saat memimpin Kabupaten Barito Kuala mampu menjawab misinya dengan baik. Demikian, perempuan politik memasuki dunia politik merupakan pembuktian dari kerja-kerja politik yang telah dilakukan oleh 5 politisi perempuan ini dihadapan publik.

Abstract

This study examines the involvement of women in politics in the legislative and executive spheres, researchers distinguish from 2 aspects, namely the political communication and cultural aspects. The current political stage phenomenon, not only men, now women are actively involved in politics in contributing to the state. Moreover, women in the current era who are actively entering the world of politics are very open from nominating themselves as candidates to the opportunity for their election to be very possible, although there are still few political women who hold strategic control in the world of politics but the opportunity already exists. The purpose of the study is to reveal the extent of the contribution of political women in the world of parliament or the executive from the perspective of political communication and culture that is developing in South Kalimantan society. This study uses a qualitative research method in the form of collecting field data, namely observation, in-depth interviews and documentation. While the library data is taken from research article data through the same research journal in the form of other writings, namely reference books, monographs, books, media coverage and textbooks as sources. The study found that the contribution of political women in the state in South Kalimantan in terms of political communication and culture is to give birth to political work and involvement in the cultural approach of the community to be able to approach constituents during the campaign-elected to produce policies. In voicing aspirations in the parliamentary chamber for 4 female legislators in this study, including being able to implement programs during the campaign. Along with that, the mission of the Regent of Barito Kuala as the first regional head executor in South Kalimantan when leading Barito Kuala Regency was able to answer his mission well. Thus, political women entering the world of politics is proof of the political work that has been done by these 5 female politicians in front of the public.



PENDAHULUAN

Politik selama ini identik dengan pekerjaan laki-laki, cerita yang beredar di masyarakat, perempuan tidak bisa masuk dan berkarir di politik. Akibatnya kedudukan perempuan semakin sulit menduduki jabatan politik ketika berkompetisi saat event politik (Agung, 2011). Eksistensi perempuan dalam instansi politik sebenarnya untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam menyuarakan suara perempuan. Tanpa keterwakilan mereka, akan mempersempit ruang bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya. Situasi ini tidak menguntungkan bagi perempuan, baik dari sisi keberadaan maupun keterlibatan wakil-wakilnya di arena politik, hingga tidak secara optimalnya menerjemahkan politik dan kepentingan perempuan itu sendiri (Ida, 2013).

Di tengah dominasi politisi laki-laki di setiap daerah atau pusat saat ini, walau sedikit secara jumlah suara perempuan terwakili melalui legislator atau kepala daerah perempuan sudah mulai bermunculan, kini sudah mulai melebar meski secara persentase belum menandingi politisi laki-laki. Intervensi perempuan dalam politik cenderung sangat rendah, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat baik secara internal maupun eksternal, seperti dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan politik itu sendiri (Michael, 2007). Faktor sosial budaya, ekonomi, masih adanya anggapan bahwa perempuan harus mengurus anak dan suami (rumah tangga), serta dukungan keluarga yang terbatas dan juga kemampuan ekonomi yang kurang. Dan dari segi suara elektorat, masih minimnya suara perempuan di parpol itu (Misbahrudin, 2014).

Dalam konteks Kalimantan Selatan, sekalipun motivasi atau keinginan perempuan di Kalimantan Selatan untuk andil serta dalam kontestasi politik ini cukup baik. Data tersebut dapat dilihat dari aktif partisipasi perempuan di provinsi ini sebagai calon legislatif pada pemilu tahun 2014 yang mencapai hampir 70%. Tetapi pada saat pertarungan di lapangan terhadap konstituen aspirasinya hanya capai 20% artinya keterpilihan perempuan di legislatif tentu masih jauh dari persentase dan hanya tinggi persentasenya pada partisipasi saat mendaftar sebagai caleg di parpol saja.

Apresiasi para caleg perempuan pada dasarnya sudah baik tapi tidak seiring dengan kepercayaan konstituen terhadap caleg-perempuan. Hasrat perempuan terhadap politik kurang sejalan dengan konstituen politik termasuk dari kalangan perempuan itu sendiri. Tentu kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan saja, tapi di daerah lain juga pasti ditemui. Setiap hasil pemilu keterpilihan jumlah perempuan yang terpilih masih minimalis antara 8%-10% saja (Hendrawati, 2017). Cukup ironis, kalau melihat motivasi dan minat perempuan dalam mendaftar pencalonan di masing-masing partai politik bisa saja lebih dari 30% sebagai calon anggota legislatif berasal dari perempuan. Dilihat dari aspek politik, fenomena ini terlihat dari minimnya partisipasi perempuan dalam arena politik untuk menyuarakan kepentingannya atau dalam artian perempuan masih belum mampu berkomunikasi secara politik sehingga yang menonjol lebih pada keterlibatan politik. Pernyataan laki-laki di media massa yang pada akhirnya menurunkan semangat eksistensi perempuan dalam berpolitik (Subiakto, 2014).

Bentuk komunikasi politik yang dilakukan perempuan sebenarnya dapat menggunakan berbagai cara, antara lain dengan menyuarakan pesan aktif kepada setiap instrumen demokrasi seperti partai politik, legislatif, ormas, dan sebagainya. Sebagai komunikator politik, tidak banyak perempuan yang terlibat dalam struktur organisasi partai politik atau menjadi anggota legislatif (Zamroni, 2013). Tentu saja, ketika aktor politik memasuki dunia politik, tantangannya adalah untuk dapat mengkomunikasikan politik secara efektif dan efisien kepada publik karena pada hakikatnya kebijakan diambil bukan hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk kepentingan rakyat. Seorang negarawan sejati harus berpijak dari keputusan yang diambil berdasarkan hati nurani sehingga dapat digunakan untuk kepentingan semua pihak (Changara, 2009).

Studi yang mengangkat kaum perempuan sebagai pemimpin di kalangan masyarakatnya terbilang sudah banyak namun dikaji melalui kacamata budaya dan komunikasi politik ini yang masih minim, apalagi kajian ini berada di daerah dimana masyarakat menganggap kepemimpinan perempuan bukan sebagai prioritas selama masih banyak laki-laki yang mampu memimpin. Seperti itulah budaya tradisional yang masih berkembang di kalangan masyarakat Banjarmasin umumnya di provinsi Kalimantan Selatan.

Daerah provinsi Kalimantan Selatan salah satunya yang memiliki relatif stok pemimpin perempuan mulai bertumbuhan walau persentasenya tetap tidak bisa mengalahkan politisi laki-laki. Di antaranya ada yang menjadi Kepala Daerah Bupati Kabupaten Barito Kuala pertama di Kalsel, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel. Di antara para Politisi perempuan yang sukses bertarung di konstelasi eksekutif dengan meraih kemenangan pada Pilkada Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 ialah Noormiliyani AS dengan raihan suara 74.169 suara yang mengungguli 2 rival lainnya. Kebetulan Noormiliyani AS juga istri Bupati Petahana sebelumnya yang telah demisioner dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalsel sebelum turun mencalon menjadi Bupati Barito Kuala. Di antara Kepala Daerah perempuan di Kalsel yang berhasil melewati perhelatan pilkada ialah Noormiliyani AS satu-satunya Kepala Daerah perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi pilkada selama pilkada di Kalsel.

Sedangkan dari kalangan konstelasi legislatif muncul dari Kader PKB, PAN, GOLKAR, GERINDRA yang sekarang juga perempuan politisi ini menempati posisi strategis di lembaga yang mereka pimpin. Di antaranya Hilyah Aulia yang juga merupakan ketua DPC PKB Banjarmasin, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin. Kemudian dari kader PAN yang bernama Hj. Rachmah Norlias sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Kalsel terpilih juga menempati posisi yang cukup strategis sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel. Kemudian Hj.

Mariana yang merupakan kader GERINDRA perempuan politisi ini juga terpilih menjadi wakil rakyat 2 periode dan di era sekarang dia menempati posisi Wakil Ketua DPRD Kalsel sekaligus menjadi Ketua DPD Gerindra Kalsel. Terakhir, ada Hj. Dewi Damayanti Said yang menempati posisi sebagai Wakil Ketua di Komisi 2 DPRD Kalsel. Hj Dewi Damayanti Said ini berasal dari GOLKAR yang lebih dulu terjun ke dunia politik dibanding 3 perempuan politisi diatas dari kalangan legislatif. Hj Dewi Damayanti Said telah malang melintang di dunia politik Kalsel dan juga merupakan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Kalsel.

Misbahruddin dalam penelitiannya menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam kancah politik tampak belum optimal, karena beberapa faktor penghambat, antara lain faktor budaya, faktor ekonomi, yang membuat keberpihakan pemilih perempuan terhambat secara politik (Misbahruddin, 2014). Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Faizal, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan telah diberikan semua haknya, termasuk hak politik yang melekat padanya (Faizal, 2016). Kemudian, penelitian relevan juga dilakukan oleh Habibah menemukan bahwa, hasil partisipasi perempuan dalam demokrasi sangat tinggi, namun permasalahannya kemudian lahir ketidakadilan akibat kesenjangan peran politik laki-laki yang lebih menonjol dibandingkan perempuan, seperti posisi manajemen perempuan dalam organisasi atau partai politik yang cenderung mendapatkan jabatan, sebagai anggota saja (Habibah, 2015). Kemudian hasil penelitian Ida menjelaskan bahwa perempuan harus perlu menanggung lagi dengan keras agar dapat diliput oleh media untuk dapat memberikan citra positif yang dapat memberikan manfaat tersendiri bagi perempuan (Ida, 2013).

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang tentunya memiliki perbedaan dari segi objek penelitian, namun memiliki kesamaan dalam kajian teori komunikasi politik dan budaya di dalamnya, yang dimunculkan namun tetap berbeda dalam hal penafsiran sajian yang akan disajikan dan dipelajari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap sejauh mana kontribusi perempuan politik di dunia parlemen ataupun eksekutif dari tinjauan budaya dan komunikasi politik yang berkembang dimasyarakat Kalimantan Selatan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif berupa pengumpulan data lapangan, yaitu penelitian berbasis data lapangan sebagai sumber utama yaitu melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan data kepustakaan adalah dengan mengambil hasil penelitian dari artikel yang diterbitkan melalui jurnal yang memiliki latar belakang penelitian yang sama, tulisan lain berupa buku referensi, monografi, pemberitaan media dan buku teks digunakan sebagai sumber sekunder. Objek kajian penelitian ini adalah tokoh politik perempuan di Kalimantan Selatan antara lain Bupati Barito Kuala, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Ketua Fraksi DPRD Banjarmasin/ Ketua Komisi III di DPRD Banjarmasin. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Kepemimpinan Perempuan Dilihat Dari Budaya Masyarakat Banjar

Terpilihnya sebagian besar perempuan sebagai eksekutif dalam skala nasional merupakan sebuah fenomena yang kurang populer dikalangan masyarakat agamis, walau Indonesia pernah dipimpin seorang dari kalangan perempuan, namun tetap saja masih melahirkan perdebatan di negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Adanya pesan-pesan agama dari kitab suci yang menegaskan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan menjadi dasar bagi masyarakat untuk kurang merespons perempuan menjadi calon pemimpin. Alasan lainnya bahwa perempuan yang memiliki kodrat keibuan, dianggap kurang mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Menurut tokoh pemuda Banjarmasin Masbukhin (Ketua Lembaga Adat Kebudayaan Banjar) mengatakan :

“.... Kalau melihat historis, biasanya Banjar ini dipimpin oleh raja-raja atau sultan-sultan yang lebih mendominasi itu adalah dari laki-laki. Apalagi ketika Islam itu masuk ke Banjar, itu lebih diperkuat lagi dalam hal kepemimpinan, bahwa yang lebih menonjol atau hak-hak keistimewaannya itu kepada laki-laki. Jadi memang masih kurang begitu familiar di Banjar ini jika perempuan menjadi pemimpin, adat budayanya itu menganut pada hak istimewa yang sudah diberikan kepada laki-laki, ” (Hasil Wawancara)

Budaya politik yang berkembang di masyarakat Banjar tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah terbentuknya kerajaan tersebut. Di mana selama kerajaan berdiri para rajanya bergelar Sultan, sehingga budaya kepemimpinan senantiasa melekat kepada kaum Adam yang membawahi pemerintahan. Namun, seiring waktu berlalu masyarakatnya mulai terbuka pola pikirnya sehingga tidak semua politisi perempuan mendapat penolakan dari masyarakat.

Hal tersebut dirasakan oleh beberapa anggota legislatif saat menemui masyarakat pemilihnya di Banjarmasin, sebagaimana pernyataan Ibu Hj. Dewi Damayanti Said (Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan), sebagai berikut:

“...Memang ada kasus di beberapa daerah kabupaten khususnya, seperti di kabupaten Banjar di Hulu Sungai, di Banjarmasin, di Kalsel ini, mereka jelas-jelas tidak menginginkan adanya perempuan untuk di legislatif maupun di eksekutif. Karena dianggap perempuan itu bukan menjadi Imam. Padahal inikan bukan mencari imam, tetapi merupakan hak bagi perempuan itu. Akan tetapi, tetap saja kebanyakan itu tadi yakni aliran-aliran keagamaan ada yang menolak untuk hal itu.” (Hasil Wawancara)

Selain itu, ia juga mengatakan terkadang pengaruh kiyai atau guru-guru sangat besar terhadap keputusan masyarakat untuk memilih wakil rakyat, sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Terkadang masyarakat ini khususnya yang agamis, istilahnya guru-guru agama itukan, mereka ada menyerukan jangan memilih pemimpin perempuan. Membuat hal-hal yang istilahnya begitu, tapi saya mengatakan bahwa saya ini bukanlah pemimpin, saya adalah mewakili perempuan, di mana ada hak-hak perempuan, kita kan ada laki-laki dan ada perempuan, yang harus dipertanggungjawabkan dan untuk yang perempuan ini juga wajib dibela.” (Hasil Wawancara)

Berdasarkan pengalaman anggota Legislatif, Ibu Hilyah Aulia, mengakui jika seorang perempuan ingin mencalonkan diri sebagai eksekutif memang berat karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki masih lebih pantas menjadi seorang pemimpin, berbeda jika posisi calon tersebut merupakan calon anggota legislatif, masyarakat lebih memberi respons apalagi dengan memperlihatkan kemampuannya kalau dapat mengemban amanah tersebut.

Ada berbagai alasan yang sering dikemukakan berkaitan dengan sukarnya akses perempuan dalam peran-peran publik tersebut. Alasan pertama, kita masih dalam budaya patriarki mencirikan kepemimpinan laki-laki, tidak peka gender (Adeni & Harahap, 2017). Kurang leluasa memberikan peranan kepada kaum perempuan untuk akses tersebut. Dalam masyarakat patriarki seperti Indonesia, peluang perempuan untuk meraih jabatan-jabatan itu membutuhkan pengorbanan tersendiri (kalau tidak bergantung pada nasib).

Para politisi kita yang kebanyakan kaum laki-laki, kecil kemungkinan mengakomodasi kepentingan perempuan. Alasan kedua, perempuan sendiri memang tidak berusaha mendapatkan kedudukan itu. Mereka cukup puas berada di belakang layar, peran-peran publik dengan mendukung perjuangan laki-laki yang notabene antara lain suami, kakak, kakek, atau saudara laki-laki mereka (Nila, 2018). Dalam konteks ini berlaku falsafah *trickle down effect*, yakni ketika laki-laki memperoleh kedudukan, keuntungan dan kesejahteraan tentu akan menetes dan ikut menyejahterakan perempuan (Ainiyah, 2017).

Temuan yang didapatkan peneliti dari kajian budaya sudut pandang masyarakat Banjar secara umum dalam menyikapi pencalonan perempuan sebagai calon eksekutif dan legislatif, pertama; masyarakat agamis tradisional, masih cenderung memilih calon pemimpin daerah dari kalangan laki-laki dari pada perempuan, selain karena sudah menjadi tradisi dimana sejak kerajaan Banjar berdiri belum pernah dipimpin oleh seorang Ratu atau Sultan. Kedua; kajian teks agama Islam berpandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan kemudian menjadi rujukan para ustadz, guru, atau kiyai dalam menentukan sikap kemudian disampaikan kepada jemaah sebagai sesuatu hal yang harus diamalkan. Ketiga; mayoritas masyarakat muslim Banjar bisa dikatakan masih konservatif saat menentukan pilihan dalam pemilu sehingga cenderung mendengarkan arahan guru atau kiyai dari pada berpikir kritis dalam menentukan pilihan.

Kemampuan dan Strategi Komunikasi Politik 5 Politisi Perempuan di Hadapan Publik dan Parpol

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2013). Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik dan memengaruhi jalannya pemerintah dan parlemen.

Komunikasi politik yang dilakukan oleh 5 responden ini memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah, parlemen dan masyarakat melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai, menjadi media yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik, mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara, menjadi watchdog atau “anjing” penjaga dalam membantu terciptanya good governance yang transparansi dan akuntabilitas.

Dari hal tersebut diatas ke 5 responden menjalani fungsi komunikasi politik saat menjabat pada kewenangan yang diemban ditambah ke 5 responden memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah mengonstruksi pesan kepada publik mengingat konsep komunikasi politik dalam unsur komunikasi politiknya sebagai *body of knowledge* juga terdiri atas berbagai unsur, yakni: sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek (Dahlan, 1990; Nimmo, 1978).

Kemampuan personal dari 5 responden ini terlihat melalui media atau terlebih saat peneliti langsung observasi mengamati perilaku politisi saat berinteraksi diwawancara terlihat bagaimana *gesture* dan *gimmick* yang antusias dari 5 responden terlihat jelas menguasai kebidangan yang diamanatkan pada mereka hal itu terlihat bagaimana mereka membangun argumentasi dan memberikan informasi dari upaya mereka telah berkontribusi melalui kewenangan yang melekat dari instansi mereka masing-masing.

Peneliti menilai bahwa ke 5 responden sudah terbiasa bertemu dengan khalayak ramai hingga kemampuan berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat sudah menjadi *habbit* yang telah lama dilakukan terlihat dari rekam jejak masing-masing dari responden ini yang memang aktif kegiatan di organisasi Masyarakat selama ini. Jika harus menguraikan kemampuan 5 politisi perempuan ini mereka memiliki kemampuan diatas rata-rata sebagai praktisi/politisi, mengapa? Kita ketahui bersama ialah memasuki dunia politik ini tidak mudah, banyak faktor yang harus dipersiapkan selain materi tentu juga mental dan kapasitas diri harus pula dipersiapkan. Untuk melihat hasil suksesi seorang memasuki dunia politik ialah soal keterpilihan sebab ujung dari event politik ialah terpilih atau duduk menjadi pejabat

diruang pemerintahan ataupun parlemen pasca pemilihan itu usai. Banyak peserta pemilu ataupun pilkada yang bertarung pada perhelatan politik tentu tak mudah menjadi terpilih tidak pria ataupun wanita itu sendiri.

Melihat hal tersebut peneliti menilai ke 5 responden memiliki komunikasi politik ke publik dalam kontestasi politik terlebih saat menjabat ini memiliki ukuran keberhasilan dalam mencapai klimaks mendapatkan amanah dari rakyat sebab persuasi komunikasi yang dilakukan di lapangan dengan komunikasi yang telah dibangun mereka itu telah mendapatkan *trust* dari publik hingga pilihan masyarakat tertuju pada mereka. Pun dari sisi strategi komunikasi politik yang mereka lakukan terhadap publik pada saat kontestasi politik ialah kemampuan dari 5 politisi perempuan ini dalam mengorganisir *stake holder* terutama komunitas kalangan perempuan, menyupervisi tim sukses, menjaring kenalan, berdialog langsung dengan warga, menyampaikan gagasan secara langsung pada konstituen.

Sedangkan strategi komunikasi politik perempuan di internal parpol ini secara legitimasi mereka ini sudah punya nama yang cukup strategis dan lama aktif di dunia kesosialan dan parpol itu sendiri. Hal itu terlihat pada aktivitas rekam jejak sebelumnya sebagai aktivis sosial & keagamaan yaitu Hilyah Aulia, pengusaha wanita yaitu Hj Mariana dan Hj Dewi Damayanti Said dan juga fungsionaris partai, eks birokrat Hj Rachmah Norlias sebagai Kadisdukacil Kota Banjarmasin, eks Ketua PKK Kabupaten Barito Kuala Normiliyani AS yang juga fungsionaris partai. Dari 5 responden di atas secara khusus dalam keaktifan di partai politik Hj Mariana diamanahi menjabat sebagai ketua DPD Gerindra Kalsel dan Hilyah Aulia sebagai ketua DPC PKB Banjarmasin yang jelas sekali mendapatkan keuntungan dalam menentukan nomor urut dan dapil lebih leluasa. Tak terkecuali Hj. Normiliyani AS (Bupati Barito Kuala) dan Hj Dewi Damayanti Said juga merupakan fungsionaris Golkar yang cukup lama dan ternama dilingkungan Golkar tentu mendapatkan perhatian penuh dari Golkar mengingat juga orang tua mereka memiliki nama besar di Kalsel sebagai mantan Gubernur Kalsel. Sedangkan Hj Rachmah Norlias seorang ex birokrat yang menjabat sebagai Kadisdukacil Kota Banjarmasin yang dengan kesempatan pasca pensiunnya beliau dilirik oleh partai PAN karena ex Walikota Banjarmasin periode dimasa Hj Rachmah Norlias ialah menjabat adalah ketua DPW PAN Kalsel 2 periode. Momentum demikian menjadikan nilai plus dari 5 responden ini untuk terbuka diterima di lingkungan parpol masing-masing terlebih 2 orang dari responden ialah ketua partai langsung hingga alur komunikasi politik sangat terbuka dalam mengambil momentum tentu kesempatan yang terbuka di internal parpol mereka masing-masing pastinya ada jejak rekam dari 5 responden yang mumpuni hingga ketika mereka sangat dipercaya oleh parpol masing-masing menandakan mereka memiliki citra positif di internal parpol mereka masing-masing.

Kemampuan komunikasi saat menjabat pun 5 responden melakukan komunikasi antar personal yang terbuka terhadap publik kepada konstituennya atau dalam upaya menyalurkan informasi yang mereka lakukan melalui media massa apa-apa yang telah dilakukannya. Hal ini terlihat dari media-media yang mempublikasikan pemberitaan para politisi perempuan ini.

Pola Komunikasi Politik 5 Politisi Perempuan

Peneliti mencoba membagi menjadi dua bagian analisis dalam melihat responden pada aspek komunikasi politiknya. Yang pertama pada fase para responden mengikuti kontestasi pemilihan politik dan pada fase menjabat sekarang dari 5 responden ini.

Dari pengamatan langsung peneliti atas 5 responden sebagai politisi perempuan ini bahwasanya ke 5 tokoh perempuan politik ini memiliki gaya komunikasi masing-masing yang khas dalam melakukan manuver politik entah terkait suksesi pada saat bertarung saat pencalonan atau kala menjabat menjadi kepala daerah dan wakil rakyat di parlemen. Secara substansi kesamaan dari ke 5 responden yang peneliti amati ialah pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh para responden ini disebut dengan komunikasi antar personal yang sangat baik. Artinya proses-proses komunikasi politik ini diimplementasikan 5 responden dapat teraplikasikan dengan baik. Proses pola komunikasi politiknya itu bisa dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Pola Komunikasi Antar Personal

Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh ke 5 responden dapat tergambar dari alur gambar diatas, proses itu bisa masuk dalam penguraian saat 5 responden ini menjadi kandidat hingga terpilih pada saat event politik ataupun saat menjabat dengan kewenangan yang dimiliki hingga perjuangan dalam mendorong kebijakan pro rakyat terwujud. Mengingat mengawal aspirasi bahkan mewujudkan program tentu tidak mudah apabila komunikasi politik yang dilakukan eksekutor ataupun legislator perempuan ini tidak menjamah konstituennya dengan pendekatan yang benar karena efek dari komunikasi yang dikonstruksi dari para politisi perempuan ini ada timbal balik dari masyarakat itu sendiri.

Kebijakan yang 5 responden lakukan untuk mewujudkan pro rakyat tidak berdasarkan ego dari pemimpin atau wakil rakyat (pada 5 responden) ini tetapi kejelian mereka dalam mencoba menyampaikan, menyerap keinginan serta mengawal hajat rakyat dengan terwujudnya sebuah program atau produk hukum yang pro masyarakat atas dasar pola komunikasi politik yang dilakukan seiring alurnya.

Dari hal itu peneliti melihat potensi dan kekuatan seorang politisi perempuan yang diteliti ini setara bahkan di atas politisi laki-laki, tentu dapat ditemui hal ini dari jawaban responden melalui komunikasi politik dari 5 responden ini. Melihat hal demikian bisa saja disebut kepantasan, sebab 5 politisi perempuan ini memang sosok yang aktif dengan jejak rekam yang positif dengan kapasitas yang dimilikinya ditambah aktifnya di keorganisasian masyarakat ataupun profesional sebelum memasuki dunia politik pemerintahan ataupun parlemen hingga konklusinya terjawab dan tak heran para responden memiliki cara komunikasi yang bagus ketika menduduki jabatan tersebut.

Dari temuan lain dari riset ini ialah juga peneliti melihat dari 5 responden yang terjun ke dunia politik, yang pertama mendapat dukungan penuh dari keluarga terutama suami dan anak-anaknya pada aspek ini peneliti melihat pengaruhnya begitu besar sebab ada *trusting & confidence* para responden atas dukungan pihak keluarga tersebut ketika menempati jabatan yang diamanahi pada mereka. Hal ini jelas sekali memiliki pengaruh yang begitu besar para politisi perempuan ini mampu tampil dengan totalitas bahkan berani berada menerima amanat jabatan strategis di dunia politik itu sendiri.

Pertama, peneliti memandang ke 5 responden ini secara karakter memang siap dan pro aktif bukan seorang yang pasif alias tahu beres walau 2 orang dari responden yang diteliti ini adalah anak dari Mantan Gubernur Kalsel yaitu Hj Normilyani AS (Bupati Barito Kuala periode 2017-2022) dan Hj Dewi Damayanti Said (Anggota DPRD Provinsi Kalsel 2019-2024) tidak menandakan nama besar dari orang tuanya dengan hanya duduk manis saja agar bisa terpilih, bahkan kedua responden ini menyebutkan inisiatif, keaktifan, meningkatkan kapasitas diri dan kemampuan tetap digali oleh diri sendirinya guna memasuki dunia politik bukan berpangku tangan pada nama besar dari orang tua saja.

Hal itu juga bisa terlihat dari profil atau jejak rekam para responden yang memang sudah berpengalaman dari dunia organisasi bahkan profesional hingga tidak sulit menyesuaikan dalam beradaptasi ketika bertemu dengan masyarakat pada dapil di konstituennya. Melihat pengalaman dalam berinteraksi di dunia masyarakat sudah lama dilakukan bukan hanya instan pastinya.

Kedua, 5 responden ini terlihat memiliki kemampuan dalam mengorganisir dan menyupervisi massa (dalam hal ini tim sukses) menurut 5 responden ialah suksesi mereka dipangung politik salah satu faktor penentu ialah timses yang bisa dipercaya. Dalam membentuk dan mencari tim politisi perempuan ini memiliki *skill* tersendiri dalam memiliki kemampuan untuk menghegemoni orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak hingga bisa membantu para responden bisa memenangkan kursi politik tersebut.

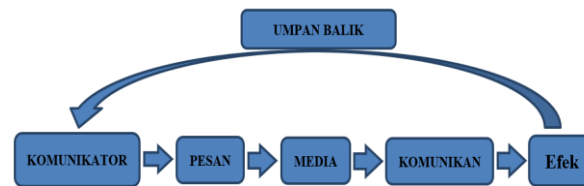
Ketiga, kemampuan berkomunikasi langsung kepada konstituen sudah terbiasa dilakukan oleh para responden ini melihat hal itu juga dibuktikan pengalaman politisi perempuan ini yang memang berada terbiasa pada lingkungan sosial kemasyarakatan hingga tak memiliki kekhawatiran mereka ketika harus bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat. Sebab porsi ini tentu tidak gampang dengan beragam karakter masyarakat kala mensosialisasikan dan membangun jejaring dalam rangka kemenangan agar bisa terpilih, jangan kan perempuan laki-laki saja bisa ada keminderan bahkan ketakutan berhadapan dengan publik.

Sedangkan saat menjadi pejabat peneliti menemukan beberapa poin yang menjadi catatan yaitu pertama bagaimana ke 5 politisi ini mampu membaca keinginan konstituennya dengan melahirkan sebuah program pro rakyat ataupun peraturan (*legal standing*) yang diterbitkan melalui perda semisalnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sensitivitas sebagai perempuan politisi sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat ini peneliti menilai ada sikap inisiatif dan upaya memikirkan konstituennya agar bisa merasakan dampak kehadiran ke 5 responden ini di konstituennya lagi pula ini juga menjadi pembuktian perempuan bisa berperan dan berkontribusi di tengah masyarakat melalui jalur politik.

Statement tersebut peneliti temui ke 5 narasumber saat diwawancarai. *Pembuktian*, merupakan *keyword* bagi mereka kala menjabat walau keterbukaan dalam penerimaan perempuan dalam politik relatif terbuka di era sekarang ini tetapi jauh dari itu soal pembuktian menjadi target para responden ini agar publik menjadi tahu dan paham bahwa perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki yang terjun di dunia politik.

Kemampuan mengolah komunikasi, Bupati dan Para Legislator ini mampu menggaet media massa sebagai media partner selama bertugas, hal ini terbukti dari pemberitaan mereka ketika melakukan sesuatu yang perlu dieskpos, cara ini dilakukan para politisi perempuan ini sebagai media mereka untuk menyampaikan pesan kepada konstituen bahwa mereka apa yang sedang dan telah dilakukan. Dengan keaktifan para politisi perempuan ini dengan menggunakan media sebagai saluran komunikasinya dalam menyampaikan kepada publik juga memberikan sinyal mereka melaporkan pekerjaan (pembuktian) kepada konstituen agar publik yang memberikan amanat kepada mereka tidak merasa sia-sia atas kerja-kerja politiknya.

Bentuk komunikasi yang dikonstruksi oleh politisi perempuan melalui media massa inilah yang membantu mereka untuk menampilkan *existing* dalam makna mempertanggung jawabkan pekerjaan sebab pekerjaan di dunia pemerintahan dan parlemen merupakan pekerjaan yang harus dipublikasikan agar masyarakat tahu apa yang dilakukan pemimpinnya dan wakilnya (keterangan diatas dapat dilihat pada gambar dibawah ini).



Gambar 11. Pola komunikasi 5 politisi perempuan pada media massa sebagai saluran komunikasi.

Kapasitas Intelektual, ke 5 responden ini memiliki kapasitas intelektual yang baik dan mampu tampil sebagai narasumber entah dalam kegiatan kedinasan sebagai pejabat atau sebagai tokoh perempuan yang aktif di tengah masyarakat artinya 5 politisi perempuan ini tidak segan apalagi takut ketika berhadapan dengan kegiatan formal atau ruang diskusi dengan kalangan masyarakat ketika menjadi narasumber dalam mengurai persoalan dalam undangan menjadi pembicara tersebut. Tentu, tidak sedikit keberanian pejabat di level ini jangkakan perempuan tokoh laki-laki di ruang publik untuk tampil peneliti kira banyak yang tidak berani tampil di tengah masyarakat saat diminta menjadi pemateri/pembicara.

The Power of Women, peneliti mendapatkan sesuatu yang bersifat “kuat” saat berdialog dengan 5 responden ini, kalau diberi istilah ialah 5 responden ini mempunyai *the power of women* dalam dirinya, maksudnya apa? Peneliti menyebut ini bisa dimaknai secara fisik ataupun metafisik. Secara fisik peneliti menilai mengingat menjadi pemimpin itu tidak mudah atau menjadi wakil rakyat yang berada pada posisi pengendali di parlemen itu pun tidak mudah terlebih apalagi perempuan yang skala jumlah mereka adalah kelompok minoritas dikarenakan banyak laki-laki yang menjadi politisi.

Tapi pada faktanya mereka mampu mengendalikan itu semua pada instansinya. Rupanya kekuatan metafisik perempuan juga menjadi penentu di sini bagaimana sosok politisi perempuan mampu menjadi jembatan ketika rapat *deadlock* hingga peran perempuan juga menjadi pendingin dimomen seperti itu. Celetukan dari 5 responden ini ditemui saat berdialog dengan peneliti bahwa sisi lembutnya perempuan bisa menjawab kebuntuan ketika diskomunikasi di parlemen. Walau celetukan Ibu Bupati juga menyebutkan bukan berarti saya ‘tidak bisa marah, maksudnya marah disini ialah tegas’. jika ada kepala dinas atau bawahan saya yang tidak seiring pekerjaan dengan target lambat tercapai tentu peran pemimpin memiliki peran ganda. Maksudnya ada nilai tegas dan kemampuan menegur bawahan atas program yang belum progress. Di sisi lain kita bisa menjadi akrab kembali sebut bupati Barito Kuala saat ketegasan harus digunakan, karena menurutnya target kepemimpinan ini ialah mewujudkan hajat masyarakat jadi tidak bisa main-main.

Dinamika kepemimpinan yang dilalui oleh Ibu Bupati dan Ibu Legislator diatas setara yang para politisi laki-laki rasakan, sama saja menurut mereka. Ini soal seni dan bagaimana mengelola SDM dengan yang baik benar hingga hegemoni politisi perempuan bisa dirasakan pada instansi yang mereka emban saat ini (Hendrawati, 2017).

Kemampuan menghegemoni, peneliti juga menemukan kemampuan menghegemoni dari politisi perempuan ini dalam membawa “perahu”-nya. Mereka bisa berkomunikasi yang baik, pendingin kala rapat “*deadlock*” tetapi ketegasan juga bisa keluar. Karena bagi para responden ini ialah soal pembuktian bahwa apa yang diamanahi itu untuk mereka hari ini benar-benar dijaga agar publik semakin percaya bagaimana politisi perempuan juga bisa walau fakta lain perempuan politisi masih saja dicecar dengan *black campaign* ketika sudah menjabat apalagi saat kontestasi politik.

Kekuatan hegemoni ini peneliti melihat ada faktor internal dan eksternal (Rush, 2007). Dari faktor internal ialah bagaimana posisi parpol yang begitu pro dengan mereka karena kesempatan mereka di parpol menjadi salah satu orang penting yang memiliki *decision maker* dari sisi keparpolan kemudian secara *personal branding* peneliti melihat memang karakter orangnya memang terbentuk dari masa ke masa ketika mereka aktif di dunia kemasyarakatan hingga politik itu sendiri.

Sedangkan dari sisi eksternal peneliti melihat responden-responden ini mengikat dirinya dengan masyarakat yang memilihnya hingga segala kemampuan untuk mempengaruhi tujuan agar sampai dalam mengadvokasi konstituennya menjadi arah pembuktian bahwa mereka para politisi perempuan ini memiliki kemampuan dan keseriusan dalam mengawal hajat masyarakat yang dimau.

Kemudian peneliti mengamati dari ke 5 responden ini memiliki *gestur* dan *gimik* bukan tipikal yang pasif malah bisa dibalang pro aktif, kala menjadi seorang pemimpin atau menjadi wakil rakyat. secara ideal ialah memiliki karakter yang demikian mengingat masyarakat yang diwakilkan bahkan dipimpin terlebih perempuan politik menjadi pembuktian di hadapan publik bahwa responden-responden ini memiliki daya komunikasi yang efektif dan efisien ketika berkomunikasi kepada publik.

Pola yang dibangun dari ke 5 responden jika dikaitkan dengan teori komunikasi antar personal merupakan komunikasi yang cukup efektif dalam menyampaikan gagasan dari sebuah kebijakan yang dijalankan atau pada saat menggaet konstituen pada event politik berlangsung. Artinya bertemu secara langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat ke 5 responden sudah sangat terbiasa ketika berhadapan dengan konstituen (publik).

Misalnya, ke 5 responden secara berkala melakukan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang berada di dapilnya masing-masing dari amatan peneliti dengan menggali hasil publikasi berita lokal kala mereka

terjun ke bawah membuktikan bahwa ke 5 responden menjalankan fungsinya sebagai penyerap aspirasi secara langsung terhadap masyarakat. Dari hasil dialog peneliti mengamati 2 dari responden yaitu Hj Normiliyani AS dan Dewi Damayanti Said merupakan anak dari mantan Gubernur Kalsel di era lampau tetapi yang menarik disini peneliti melihat bahwa sekalipun orang tua dari 2 responden ini pernah menjadi penguasa di eranya bukan berarti 2 tokoh perempuan ini hanya mengandalkan nama dari kebesaran nama ayahnya atau bisa dibilang sebatas tokoh yang “duduk manis” saja di dunia politik maka dari dialog peneliti dengan gaya komunikasi tersebut tidak tampak itu ada. Melainkan politik yang dibangun 2 responden yang memiliki trah politisi ini menampilkan sisi kapasitas dan potensi diri dalam mendalami pengetahuan dan keseriusan ketika menjadi pemimpin ataupun wakil rakyat.

Mereka secara serius menyajikan kapasitas yang sangat baik hingga ketika berada di ruang eksekutif dan parlemen, keduanya tidak kagok karena sudah terbiasa aktif terjun dunia sosial dengan aktif di berbagai organisasi yang pernah digeluti di masa mahasiswa dulu. Sedangkan 3 responden lain secara trah tidak memiliki orang tua yang memasuki dunia politik sebagai petinggi di daerah melainkan 3 orang responden ini Hj Rachmah Norlias, Hj Mariana, Hilyah Aulia andil dalam dunia politik melalui proses seperti halnya para pria yang juga terjun dunia politik hingga bisa dipercayakan menjadi anggota DPRD di periode kali ini 2019-2024.

Dalam konteks keluarga, tentu keluarga menjadi pendorong dan pendukung utama ketika ke 5 responden ini terjun ke dunia politik sebab kuncinya ialah dukungan keluarga menjadi sangat penting menurut ke 5 responden dari gerakan dan komunikasi politik yang dikonstruksi mereka tidak bisa berada dititik sekarang ini. 5 responden ini menjawab proses komunikasi politik yang mengena di nilai yang sama dengan implementasi alur komunikasi yang selaras dengan kondisi lapangan dan ide yang disampaikan dari komunikator.

Dari hasil audit komunikasi politik peneliti secara khusus menemukan ke 5 memiliki pola komunikasi politik yang terbuka, lugas, tegas, luwes dengan menggunakan media massa sebagai saluran tambahan ataupun berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika mereka menyampaikan titik perjuangan mereka yang berada ditingkat eksekutif ataupun legislatif saat diwawancarai. 5 responden ini terlihat sudah terbiasa ketika berhadapan dengan publik entah warga dapilnya ataupun media massa itu sendiri hingga rasa percaya diri yang baik, terdapat pola pikir dan paradigma dalam melihat masalah kemampuan berkomunikasi dengan baik di wilayah kerja masing-masing.

Peneliti juga mengulik data sekunder berupa pemberitaan-pemberitaan terkait dari responden ditemukan bagaimana peran mereka di hadapan khalayak ramai dalam menyosialisasikan perda, menyerap aspirasi, menjadi pembicara terkait dunia perempuan dan tampil di depan media televisi. Dari 5 responden menyebutkan di era sekarang keterbukaan penerimaan atas politisi perempuan sudah terbuka berbeda memang pada masa lalu.

Terlebih pembuktiannya ialah kepala daerah di Kalsel melalui kabupaten Barito Kuala perempuan pertama yang terpilih menjadi bupati Barito Kuala. Walau sering kali ditemukan masih ada saja *black campaign* atas kandidat perempuan pada masa pilkada hingga posisi perempuan sebagai kandidat bisa terjegal.

Berbeda dengan pencalegan, responden dari penelitian ini menyebutkan bahwa posisi masa pencalegan itu relatif aman maksudnya ialah jarang ada serangan *black campaign* atas kandidat untuk dijegal untuk perempuan tersebut agar tak terpilih melalui jalur legislatif. Pencalegan secara umum memiliki makna tersirat ialah bukan menjadi pemimpin *output*-nya melainkan hanya menjadi wakil rakyat dari dapil yang telah ditentukan KPU berbeda memang dengan pilkada yang secara utuh kandidat yang terpilih menjadi kepala daerah memiliki otoritas penuh atas daerahnya hingga posisi berhasilnya menang terpilih pada event pilkada ialah tersurat maknanya menjadi kepala atau pemimpin bagi daerah tersebut.

Ke 5 responden dari observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui data sekunder yang dikumpulkan berupa media online yang memberitakan merupakan perempuan yang aktif dan terbiasa untuk berkomunikasi di hadapan publik hal ini dibuktikan dari pemberitaan-pemberitaan yang muncul di media ketika menjawab persoalan atau memfungsikan kewenangannya menjadi anggota parlemen terlebih posisi Bupati.

KESIMPULAN

Ditinjau dari komunikasi politik, Pola komunikasi politik yang dibangun dari ke 5 politisi perempuan memiliki pola komunikasi yang luwes dan baik yang bisa dikenal dalam teori komunikasi yaitu komunikasi antar personal, ke 5 politisi perempuan ini memiliki potensi yang sangat baik dalam merajut komunikasi antar personal termasuk kepada konstituen dan tim sukses dalam konteks suksesi pada event politik ataupun saat bertugas di eksekutif & parlemen. Ke 5 politisi perempuan ini juga memiliki kemampuan dalam mengolah pesan dengan menyampaikan pesan yang lebih luas dengan menggaet media massa sebagai saluran politiknya agar kerja-kerja politiknya bisa dilihat konstituennya lebih luas, tentu tidak semua politisi yang mampu berbicara di depan media massa entah laki-laki ataupun perempuan politisi tetapi hal itu dapat dipatahkan ke 5 politisi perempuan ini bahwa media massa menjadi mitra mereka dalam menyalurkan komunikasi lebih luas lagi dan kecakapan berkomunikasi dengan media massa 5 politisi sudah terbiasa. Sedangkan ditinjau dari studi budaya, ke 5 politisi perempuan ini menyebutkan bahwa era sekarang keterbukaan atas perempuan untuk menjadikan politik sebagai wilayah pengabdian sudah terbuka tetapi memang tantangan perempuan yang akan memasuki dunia politik tentu tidak mudah hal ini berlaku pada internal dan eksternal dirinya. Terutama kaitan dengan dukungan keluarga jika keluarga tidak mendukung optimal maka menjadi berat langkah mereka memasuki panggung

politik, karena itu dukungan keluarga menjadi kunci utama semangat dalam memasuki panggung politik parlemen ataupun eksekutif. Termasuk aspek budaya yang masih melihat perempuan masuk dalam dunia politik bukan panggung yang cocok bagi perempuan tetapi stigma itu dapat diuraikan dengan baik selama mereka menjabat bahwasanya ke 5 politisi perempuan ini mampu membuktikan dalam konteks keterwakilan ataupun menjadi eksekutor perempuan politisi bisa menjalankan kerja politik dengan baik saat mengemban amanah itu. Walau tantangan perempuan yang memasuki dunia politik masih terasa berat dalam menyaingi kaum laki-laki dipanggung politik jika dilihat dari sisi kuantitas keterpilihan perempuan yang mengisi panggung politik didaerah ataupun nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, saya secara istimewa berterima kasih kepada Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Bapak Ajahari, M. Pd, Kepala LP2M Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Kepada para responden mulai dari Ibu Bupati Barito Kuala, Ibu Wakil Ketua dan Anggota DPRD Prov. Kalimantan Selatan beserta jajarannya, Anggota Legislatif Kota Banjarmasin beserta jajarannya, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan buat peneliti. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu dalam menyusun laporan penelitian ini. Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

REFERENSI

- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). *Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi UMJ*, 1 (2).
- Agung, W. S. (2011). *Political Branding & Humas*. Kompas Gramedia.
- Ainiyah, N. (2017). Komunikasi Politik Perempuan: Strategi Komunikasi Politik Perempuan Fatayat Situbondo Dalam Hegemoni Politik Priyayi. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 11 (2).
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (1 ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Astim, R. (2006). Budaya Politik Indonesia. *Makalah dalam Pra Perkuliahan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (Prodi PPKn) Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (1 ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burke, P. (2015). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Changara, H. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, M. D. (1990). *Model-model Mengajar*. Diponegoro.
- (Diakses pada tanggal 1 September 2022). (t.t.-a). Diambil dari <https://dprd.banjarmasinkota.go.id/>
- (Diakses pada tanggal 1 September 2022). (t.t.-b). Diambil dari <https://dprdkaselprov.id/>
- (Diakses pada tanggal 1 September 2022). (t.t.-c). Diambil dari <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-barito-kuala/>
- Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Government and Civil Society*, 1 (1).
- Faizal, L. (2016). Wanita Dalam Politik (Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal TAPIS*, 12.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibah, S. (2015). Partisipasi dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(2).
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2).
- Hedebro, G. (1982). *Communication and Social Change in Developing Nations: A Critical View*. Iowa State University Press.
- Hendrawati. (2014). Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi (LEGISLATIF) Women Recruitment be a (LEGISLATIVE) Politician. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 18(2).
- Hendrawati. (2017). *Memahami Mendung Konflik Etnis: Suatu Analisa Di Balik Tragedi Sampit*. Lokus.
- Ida, R. (2013). Liputan Media Tentang Politisi dan Aktivitas Politik Perempuan. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 4(1).
- McNair, B. (2003). *An Introduction to Political Communication*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Michael, P. A. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Press.
- Mirin, M. (2022). Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan. *Syntax literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9).
- Misbahruddin, A. (2014). Peluang Perempuan Sebagai Politisi Women Chance To Be Politician. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 18(3).
- Mufti, M. (2013). *Teori-Teori Politik* (1 ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2).
- Muslich, M. (2008). Kekuasaan Media Massa Mengonstruksi Realitas. *Bahasa dan Seni*, 36(2).
- Nila, S. (2018). *Perbedaan Identitas Pria dan Wanita: Analisis Gender dan Politik dari Perspektif Post-Feminis*.
- Nimmo, D. D. (1978). *Political Communication and Public Opinion in America*. Goodyear Publishing Company.
- Nurudin. (2009). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Pudjitrherwanti, dkk. (2019). *Ilmu Budaya dari Strukturalisme Budaya Sampai Orientalisme Kontemporer* (1 ed.). Banyumas: Agency CV Rizquna.
- Putra, D. K. S. (2012). *Media dan Politik: Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmani, T. Y. (2004). Kepemimpinan Wanita di Indonesia Perspektif Budaya dan Agama. *UNISUNO*, 27(2).
- Robbins, S. P. (1998). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Application* (8 ed.). New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Rudy, T. M. (2013). *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya* (VI).
- Rush, M., & P. A. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta.
- Saleh, K., & Munif, A. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, 9(2).
- Silvana, H. (2013). Peran Media Massa Pada Komunikasi Politik di Indonesia. *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 1(1).
- Subiakto, H., & Ida, R. (2014). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik* (6 ed.). Jakarta: PT. Garsindo.
- Voltmer, K. (2006). *Media Massa dan Dinamika Komunikasi Politik Dalam Proses Demokratisasi*. Routledge / ECPR Studies In European Science.
- Wulandari, M. P., Zaro, M. N., & Sujoko, A. (2022). Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan: Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1).
- Zamroni, M. (2013). Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender. *Jurnal Dakwah*, 14(1).